

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Suatu negara tentu memiliki tujuan dan cita-cita nasional untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Didalam mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang Bangsa, sebagaimana bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan yang merupakan rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan. Seluruh kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan demi tercapainya tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD1945 alinea ke IV (Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)

Pembangunan bukan hanya menciptakan perubahan dan kemajuan dibidang fisik, melainkan juga pembangunan manusianya. Pembangunan adalah suatu

usaha untuk membentuk, membina, memperbaharui serta mengembangkan aspek kehidupan masyarakat secara bertahap dan berencana yang dilakukan secara sadar menuju cita-cita tujuan bangsa tersebut.

Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan social budaya sebagai pendukung keberhasilannya dan menghasilkan perubahan sosial budaya. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam suasana perikehidupan bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Sementara, yang menjadi hakikat pembangunan nasional Indonesia ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya tugas dan tanggung jawab dari pemerintah saja, tapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian setiap warga negara Indonesia harus ikut serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu peran serta atau partisipasi masyarakat adalah melalui LKMK yang diperkasai oleh masyarakat setempat dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung bertujuan membantu pemerintahan kampung dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta

menggerakkan gotong royong masyarakat dalam pembangunan sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A menyatakan :a

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota diatur dalam UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang.

Selain itu masalah mengenai pemerintahan daerah juga terdapat di dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur pemerintahan daerahnya dengan didasarkan tiga asas. Menurut Huda (2009:306) penyelenggaraan pemerintah daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, deskonsentrasi dan tugas pembantuan. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 49 Tahun 2001, tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menentukan nama dan peristilahan lain dalam pemerintahan desa sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Dengan demikian peristilahan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) telah

berubah menjadi LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung). Hal ini tercantum dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.10 Tahun 2008 tentang pembentukan LKMK sesuai dengan kebutuhan kampung.

Walaupun demikian masih banyak kampung tertinggal atau kampung miskin yang belum sesuai dengan harapan, kondisi pembangunan di kampung tersebut. Hal ini disebabkan karena kurang harmonisnya hubungan antara LKMK dengan masyarakat, juga antara LKMK dengan perangkat desa lainnya. LKMK sebagai wadah masyarakat seharusnya mampu menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat. LKMK seharusnya tidak bersikap apatis terhadap masyarakat sehingga LKMK dan unsur perangkat kampung lainnya tidak hanya sebagai formalitas saja dalam struktur organisasi pemerintahan kampung.

Adanya hubungan kerja sama yang baik antara LKMK dengan Datok penghulu serta perangkat kampung lainnya perlu ditingkatkan guna memajukan pembangunan kampung tersebut. Akan tetapi hubungan yang sangat baik itu jangan lah menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dan kejujuran dari LKMK dan perangkat kampungl lainnya. Setiap kampung memiliki latar belakang sosial, budaya dan ekonomi yang berbeda-beda, untuk itu LKMK harus mampu menghilangkan kesenjangan-kesenjangan sosial yang nantinya dapat menimbulkan konflik, sebagaimana yang selama ini sering terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang tersebar diberbagai daerah, baik dikota maupun didesa. Untuk itulah dibutuhkan LKMK yang berjiwa nasionalis dalam

melaksanakan pelayanan dan menumbuhkan sikap toleransi dalam kerukunan umat beragama. Kebijakan-kebijakan LKMK merupakan kegiatan yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Jelas bahwa dengan adanya peran LKMK yang baik tentu menjadikan kampung semakin maju dan berkembang. Untuk itulah perlu adanya suatu rencana kerja dengan baik agar keputusan maupun tindakan yang diambil dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk memilih judul “ **Peran LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung) dalam meningkatkan pembangunan di desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Menurut Poerwadarmita (2000:294): “ Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan Identitas, masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan” , jadi identifikasi masalah adalah menentukan atau menetapkan sesuatu yang harus dipecahkan mengingat dalam suatu penelitian banyak dijumpai permasalahan maka harus dicari penyelesaiannya.

Yang menjadi Identifikasi Masalah Dalam Penelitian ini adalah :

1. Peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung (LKMK) sebagai Wahana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Kebun Sungai Liput.
2. Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung (LKMK) terhadap pembangunan Kampung Kebun Sungai Liput.

3. Peranan LKMK dalam mengatasi masalah dan kesulitan terhadap peningkatan pembangunan Kampung Kebun Sungai Liput
4. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi, tugas, kedudukan LKMK dalam peningkatan Pembangunan Kampung Kebun Sungai Liput.

### **C. Pembatasan Masalah**

Sebelum dikemukakan apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini, terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan masalah. Dalam buku kamus Bahasa Indonesia Poerwadarmita mengatakan “ masalah berarti soal yang harus dipecahkan”.

Sedangkan menurut Nasution (2007:20), yang menyatakan bahwa:

Analisis masalah juga membatasi ruang lingkup Masalah. Disamping itu masih perlu dinyatakan secara khusus batas-batas masalah agar penelitian lebih terarah. Lagi pula dengan demikian kita peroleh gambaran yang jelas, apabila penelitian itu dapat dianggap selesai dan berakhir. Pembatasan ini diperlukan bukan saja untuk memudahkan atau menyederhanakan masalah bagi penyelidik tetapi juga untuk dapat menetapkan lebih dahulu segala sesuatu yang diperlukan untuk pemecahannya.

Sesuai dengan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa masalah merupakan persoalan-persoalan yang timbul dalam berbagai hal yang mengandung arti adanya suatu tantangan atau hambatan-hambatan yang harus diselesaikan.

Untuk mempermudah penelitian ini dilapangan perlu diberi batasan masalah agar tidak terjadi kesimpangsiuran, hal ini berguna agar dalam melaksanakan penelitian dapat terarah.

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung (LKMK) sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Kampung Kebun Sungai Liput.
2. Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung (LKMK) terhadap Pembangunan Kampung Kebun Sungai Liput.
3. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi, tugas, kedudukan LKMK didalam meningkatkan Pembangunan Kampung Kebun Sungai Liput.

#### **D. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan hal yang utama dalam suatu penelitian. Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap masalah yang dibicarakan maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran LKMK sebagai Wahana partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan kampung Kebun Sungai Liput ?
2. Bagaimana fungsi LKMK dalam pembangunan di kampung Kebun Sungai Liput ?
3. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi, tugas dan kedudukan LKMK didalam meningkatkan pembangunan kebun Sungai Liput ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sudah merupakan hal yang lazim bagi setiap orang yang melakukan penelitian terlebih dahulu menentukan tujuan apa yang hendak dicapai, sebab tanpa tujuan segala yang dilakukan akan membawa hasil yang sia-sia.

Lebih lanjut seperti yang dikemukakan oleh Nasution (2007:17) :

Tiap penelitian harus mempunyai tujuan atau tujuan-tujuan yang harus dicapai. Tujuan bertalian erat dengan masalah yang dipilih serta analisis masalah itu. Tidak ada ketentuan berapa banyak tujuan yang harus dicapai dalam suatu tesis. Banyaknya tujuan dapat mengakibatkan banyaknya waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran LKMK sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di kampung Kebun Sungai Liput.
2. Untuk mengetahui fungsi LKMK di kampung Kebun Sungai Liput
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat peranan LKMK dalam meningkatkan pembangunan kampung Sungai Liput.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pemahaman dan pengetahuan peneliti tentang pembangunan kampung khususnya dan pembangunan Nasional umumnya
2. Memberikan informasi tentang peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung (LKMK) sebagai wahana partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan desa
3. Memberi informasi tentang faktor yang mendukung dan menghambat peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung (LKMK) dalam pembangunan
4. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung (LKMK) serta masyarakat Kampung Kebun Sungai Liput.